
Strategi Percepatan Implementasi Srikandi Di Kementerian Perindustrian Untuk Kearsipan Digital Pemerintahan Modern

Rizki Hendriarti¹, Asropi²

^{*1}Kementerian Perindustrian

² Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: ¹rizkihendriarti@gmail.com , ²asropi@upnvj.ac.id

^{*}Corresponding author: rizkihendriarti@gmail.com

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Terima: 10-05-2026

Revisi: 10-06-2026

Disetujui: 01-07-2026

Publish online: 03-07-2026

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kebutuhan strategis dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Salah satu instrumen pendukungnya adalah aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), yaitu platform nasional untuk pengelolaan arsip dinamis elektronik. Makalah ini bertujuan menganalisis faktor pendukung, faktor penghambat, serta merumuskan strategi percepatan implementasi SRIKANDI di lingkungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis data sekunder melalui studi dokumen audit. Analisis mengacu pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta teori perubahan organisasi Kotter. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi SRIKANDI telah berjalan di tingkat pusat, tetapi belum merata pada seluruh unit kerja daerah. Hambatan utama meliputi keterbatasan infrastruktur jaringan, rendahnya pemahaman pegawai terhadap teknologi informasi, serta penggunaan sistem intranet internal dan media komunikasi tidak resmi dalam korespondensi dinas. Sementara itu, faktor pendukungnya mencakup landasan hukum yang kuat melalui Perpres No. 95 Tahun 2018 dan komitmen pimpinan terhadap transformasi digital. Percepatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan tata kelola kearsipan digital yang andal dan mendukung terwujudnya digital government di Indonesia.

Kata Kunci: SPBE, Aplikasi SRIKANDI, Implementasi Kebijakan, Kearsipan Elektronik, Kementerian Perindustrian.

ABSTRACT

The implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) has become a strategic necessity in realizing an effective, transparent, and accountable bureaucracy. One of its supporting instruments is the SRIKANDI application (Integrated Dynamic Archival Information System), a national platform for managing electronic dynamic records. This paper aims to analyze the supporting and inhibiting factors, as well as to formulate strategies to accelerate the implementation of SRIKANDI within the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia. The method used is descriptive qualitative research with secondary data analysis through audit document review. The analysis refers to Van Meter and Van Horn's policy implementation model and Kotter's organizational change theory. The findings show that SRIKANDI

implementation has been carried out at the central level, but has not been evenly applied across all regional work units. The main obstacles include limited network infrastructure, low employee understanding of information technology, and the continued use of internal intranet systems and unofficial communication media in official correspondence. Meanwhile, the supporting factors include a strong legal basis through Presidential Regulation No. 95 of 2018 and leadership commitment to digital transformation. This acceleration is expected to optimize reliable digital records governance and support the realization of digital government in Indonesia.

Keywords: SPBE, SRIKANDI Application, Policy Implementation, Electronic Archiving, Ministry of Industry.

PENDAHULUAN

Arsip memegang peranan penting dalam perjalanan hidup sebuah bangsa. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dimana arsip memiliki peran dalam menjaga identitas dan jati diri bangsa. Selain itu, arsip juga merupakan alat untuk menyimpan memori perjuangan bangsa. Arsip yang dijaga, akan diwariskan sebagai bagian pertanggungjawaban kita kepada generasi mendatang.

Di tengah situasi ini, pesatnya perkembangan teknologi informasi hadir membawa harapan baru. Teknologi kini tidak lagi hanya menjadi alat bantu di sektor publik, melainkan menjadi jembatan untuk menyelamatkan sisa-sisa memori kita. Melalui digitalisasi dan sistem informasi kearsipan yang modern, kita memiliki kesempatan untuk merawat, mengamankan, dan menghidupkan kembali arsip-arsip yang kita miliki. Sebagaimana disampaikan oleh Daft (2021), teknologi digital modern kini berfungsi sebagai sistem saraf pusat organisasi yang mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat manajemen pengetahuan melalui penyimpanan data yang terintegrasi. Daft menekankan bahwa dalam era digital, kemampuan organisasi untuk mentransformasi data menjadi informasi yang terstruktur adalah kunci bagi keberlangsungan institusi. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi, bukan lagi sekedar mengikuti tren digital, melainkan sebuah upaya untuk menjaga sejarah bangsa tidak lagi tercecer. Pemanfaatan teknologi merupakan langkah strategis untuk terus merawat dokumentasi bangsa ke dalam ruang digital.

Pemerintah perlu melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi, sebagaimana ditekankan oleh Hadi (2022). Salah satu wujud nyata inovasi tersebut adalah peluncuran aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) pada tahun 2020. Implementasi SRIKANDI merupakan langkah strategis dalam mengakselerasi mandat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di sektor kearsipan. Integrasi teknologi informasi diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan kerangka kerja

inovasi sektor publik yang diusung oleh Bason (2010), serta visi transformasi digital birokrasi yang ditegaskan oleh Hadi (2022).

Implementasi Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) merupakan manifestasi nyata dari amanat tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020, SRIKANDI ditetapkan sebagai aplikasi umum nasional di bidang kearsipan dinamis. Mandat ini diperkuat secara teknis melalui Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021. Di mana setiap instansi pusat wajib menggunakan SRIKANDI sebagai aplikasi umum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Oleh karena itu, penggunaan sistem internal yang bersifat silo harus segera ditinggalkan untuk mendukung terwujudnya ekosistem kearsipan nasional yang kohesif. Seperti yang diungkapkan Daft (2021) dalam bukunya *Organization Theory & Design* dimana organisasi modern harus bergeser dari sistem yang bersekat menuju sistem yang terintegrasi. Dimana dalam sebuah ekosistem digital, informasi bergerak dengan fleksibel melewati sekat - sekat departemen. Hal ini memungkinkan lahirnya kolaborasi antar departemen. Bagi Kementerian Perindustrian, digitalisasi kearsipan adalah instrumen vital dalam menjamin kecepatan pengambilan kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Read & Glinn (2010) menerangkan bahwa digitalisasi arsip bukan hanya memindahkan arsip dari kertas ke digital. Digitalisasi arsip berarti menjaga suatu informasi secara utuh, dari penciptaan sampai dengan pemusnahan.

Penelitian mengenai implementasi SRIKANDI telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian Aini (2023) pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa implementasi SRIKANDI mampu mendukung pengelolaan arsip digital dan meningkatkan kemudahan akses dokumen. Namun demikian, penelitian tersebut menemukan adanya hambatan berupa ketidakstabilan jaringan, belum optimalnya penerapan di seluruh unit kerja, serta kurangnya dukungan pimpinan dalam implementasi sistem. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kurniadi, Ibrahim, dan Badruzzaman (2025) menemukan bahwa implementasi SRIKANDI memberikan dampak positif terhadap efisiensi pengelolaan arsip melalui percepatan akses dokumen, peningkatan kolaborasi antarunit kerja, dan optimalisasi penyimpanan arsip digital. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa aspek infrastruktur teknologi dan pelatihan sumber daya manusia masih menjadi kendala utama dalam optimalisasi penggunaan aplikasi. Sementara itu, penelitian Suprayitno, Rahmi, dan Sofiyani (2024) menjelaskan bahwa implementasi SRIKANDI merupakan bagian dari agenda besar transformasi digital birokrasi nasional untuk mengatasi fragmentasi aplikasi pemerintahan yang sebelumnya berjalan secara silo. Penelitian tersebut menyoroti bahwa rendahnya tingkat pengguna aktif SRIKANDI masih dipengaruhi oleh resistensi organisasi, keterbatasan infrastruktur, dan lemahnya koordinasi antarlembaga.

Kajian mengenai penerimaan teknologi juga dilakukan oleh Auvelia dan Marlina (2025) pada Kantor Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan menggunakan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SRIKANDI berada pada kategori sangat baik karena mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas pengelolaan arsip dinamis. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan aplikasi pada level operasional organisasi. Selain itu, penelitian Altino dkk. (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi e-government, termasuk SRIKANDI, sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan pengguna terhadap sistem. Faktor teknis, dukungan organisasi, kondisi fasilitas, risiko penggunaan, dan pengaruh sosial terbukti memengaruhi tingkat kepercayaan pengguna terhadap aplikasi pemerintahan digital. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital birokrasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan sumber daya manusia.

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 4 Nomor: 1 (April: 2026) pp: 48-65

DOI: <https://doi.org/10.61492/baashima.v4i1.530>

Perbedaan fokus dan ruang lingkup antara penelitian in dengan penelitian terdahulu disajikan pada table berikut.

Tabel 1. Penelitian Aplikasi SRIKANDI pada Jurnal Terdahulu

No.	Judul Penelitian/Peneliti/Tahun	Metode	Fokus Pembahasan	Temuan Penelitian	Keterbatasan Penelitian
1.	Pengelolaan Arsip Berbasis Digital Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (Yulia Nurul Aini (2023))	Kualitatif Deskriptif dengan Teori Inovasi Rogers	Mengkaji penerapan aplikasi SRIKANDI dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi di BMKG	Implementasi SRIKANDI meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip melalui percepatan akses dokumen, peningkatan kolaborasi antarunit kerja, dan optimalisasi penyimpanan arsip digital	Penelitian masih berfokus pada implementasi teknis aplikasi dan faktor inovasi organisasi pada satu instansi
2.	Evaluation of the efficiency of electronic filing systems in handling records: a case study of SRIKANDI applications in government institutions. (Kurniadi, Syafei Ibrahim dan Badruzzaman (2025)).	Kuantitatif. Data dikumpulkan dari 100 pegawai di berbagai level institusi.	Menganalisis pengaruh implementasi SRIKANDI terhadap efisiensi pengelolaan arsip dan kesiapan institusi pemerintah dalam mengadopsi arsip digital	Penelitian ini menggunakan pendekatan <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SRIKANDI berada pada kategori sangat baik karena mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas pengelolaan arsip dinamis. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan aplikasi pada level operasional organisasi.	Penelitian lebih menitikberatkan pada efisiensi sistem dan kesiapan teknologi organisasi
3.	Implementasi aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI) untuk pengelolaan arsip dinamis	Kuantitatif. Data dengan metode Technology Acceptance Model (TAM). Data	Mengkaji implementasi aplikasi SRIKANDI pada tingkat kecamatan.	Implementasi SRIKANDI merupakan bagian dari agenda transformasi digital birokrasi untuk mengatasi fragmentasi aplikasi	Penelitian berfokus pada persepsi kemanfaatan dan kemudahan

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 4 Nomor: 1 (April: 2026) pp: 48-65

DOI: <https://doi.org/10.61492/baashima.v4i1.530>

	di kantor Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan (Auvelia Septya Eka & Marlina (2025)).	dikumpulkan dari 7 orang melalui teknik <i>purposive sampling</i> .		pemerintahan yang sebelumnya berjalan secara silo.	penggunaan aplikasi pada level operasional organisasi
4.	Imagining the Future of Records Management: An Analysis of the SRIKANDI in Indonesia through Documentation Studies. (Suprayitno. Rahmi & Zulfatun Sofiyani (2025)).	Model analisis dokumen komplementer	SRIKANDI tidak sekadar berperan sebagai sistem pengelolaan arsip digital, melainkan juga sebagai instrumen integrasi kelembagaan yang mampu memperkuat keterhubungan antarinstansi pemerintah secara fisik, sosial, dan konseptual.	Keberhasilan implementasi e-government dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan pengguna, dukungan organisasi, kondisi fasilitas, risiko penggunaan, dan pengaruh sosial	Penelitian masih bersifat makro dan berfokus pada transformasi digital birokrasi nasional
5.	Measuring Factors of Trust in the Use of E-Government: A Multi-Factor Analysis of the E-Government in Indonesia. (Iqbal Caraka Altino, dkk (2025))	Integrasi Model Keberhasilan Sistem Informasi DeLone & McLean (ISSM), UTAUT2, dan TAM	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor teknis dan non teknis yang mempengaruhi kepercayaan pengguna untuk mengadopsi e-government.	Penelitian ini menggunakan pendekatan <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SRIKANDI berada pada kategori sangat baik karena mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas pengelolaan arsip dinamis. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan aplikasi pada level operasional organisasi.	Penelitian berfokus pada faktor kepercayaan pengguna terhadap sistem e-government secara umum

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian mengenai SRIKANDI masih berfokus pada aspek implementasi teknis aplikasi, penerimaan pengguna, efektivitas penggunaan sistem, serta faktor-faktor teknologi informasi. Penelitian sebelumnya umumnya menggunakan pendekatan implementasi inovasi, Technology Acceptance Model (TAM), maupun analisis kepercayaan pengguna terhadap sistem digital. Namun demikian, penelitian mengenai implementasi SRIKANDI yang dikaitkan dengan kualitas tata kelola kearsipan secara substantif masih relatif terbatas, khususnya pada instansi kementerian yang memiliki kompleksitas tata kelola arsip tinggi seperti Kementerian Perindustrian. Selain itu, masih sedikit penelitian yang mengaitkan implementasi digitalisasi arsip dengan hasil pengawasan kearsipan, kesiapan kebijakan internal, sinkronisasi sistem, serta kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan pengelolaan arsip dinamis. Padahal, berdasarkan hasil Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) ANRI Tahun 2024 dan 2025, Kementerian Perindustrian menunjukkan capaian tingkat digitalisasi arsip yang sangat tinggi, namun di sisi lain mengalami penurunan nilai hasil pengawasan kearsipan secara keseluruhan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara keberhasilan digitalisasi aplikasi dengan kualitas tata kelola kearsipan substantif yang belum sepenuhnya optimal.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital kearsipan tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kualitas sumber daya manusia, kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan, serta efektivitas tata kelola arsip dinamis. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi digitalisasi kearsipan melalui aplikasi SRIKANDI dari perspektif tata kelola kearsipan, kesiapan organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan efektivitas pengawasan kearsipan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penurunan nilai hasil pengawasan kearsipan di Kementerian Perindustrian serta merumuskan strategi percepatan implementasi pengelolaan arsip digital melalui aplikasi SRIKANDI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagai lokus penelitian. Pengolahan data sekunder dilakukan terhadap 55 satuan kerja (satker) pusat yang berada di bawah koordinasi 9-unit eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian, yaitu sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA);
4. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE);

5. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT);
6. Direktorat Jenderal Industri Agro (IA);
7. Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII);
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI); dan
9. Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI).

KERANGKA TEORI ADMINISTRASI PUBLIK DAN SISTEM INFORMASI

Strategi percepatan ini disusun berdasarkan sintesis teori administrasi dan manajemen informasi modern:

- **Model Implementasi Van Meter & Van Horn**

Implementasi SRIKANDI di Kementerian Perindustrian mengalami dinamika. Pada tahun 2024 Kementerian Perindustrian sudah memperoleh prestasi dengan nilai sebesar 90,53 yang kemudian mengalami penurunan sebesar 88,34. Untuk membedah fenomena tersebut, analisis dilakukan menggunakan model Van Meter dan Van Horn (1975) melalui enam variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, dan disposisi pelaksana.

- **Model Perubahan Kotter.**

Dalam rangka mempercepat implementasi SRIKANDI perlu dilakukan strategi yang tepat. John Kotter (2024) menawarkan 8 akselerator perubahan yang dirancang untuk mengubah inovasi menjadi budaya kerja permanen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Kesiapan Aplikasi SRIKANDI sebagai Inovasi Nasional

SRIKANDI merupakan implementasi dari Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2014) antara empat instansi: ANRI, Kementerian PAN RB, Komdigi, dan BSSN. Sebagai inovasi sektor publik (Bason, 2010), SRIKANDI menawarkan solusi integratif yang mencakup:

- Efisiensi Penemuan Kembali: Pencarian dokumen dalam hitungan detik, menghilangkan hambatan fisik arsip.
- Koordinasi Lintas Unit: Memfasilitasi disposisi dan persetujuan naskah dinas secara real-time tanpa batasan geografis.
- Optimalisasi Anggaran: Reduksi signifikan biaya ruang penyimpanan, logistik pengiriman, dan penggunaan kertas (paperless).

- Legalitas dan Autentisitas: Penggunaan tanda tangan elektronik yang menjamin keamanan dan keabsahan hukum setiap dokumen negara.

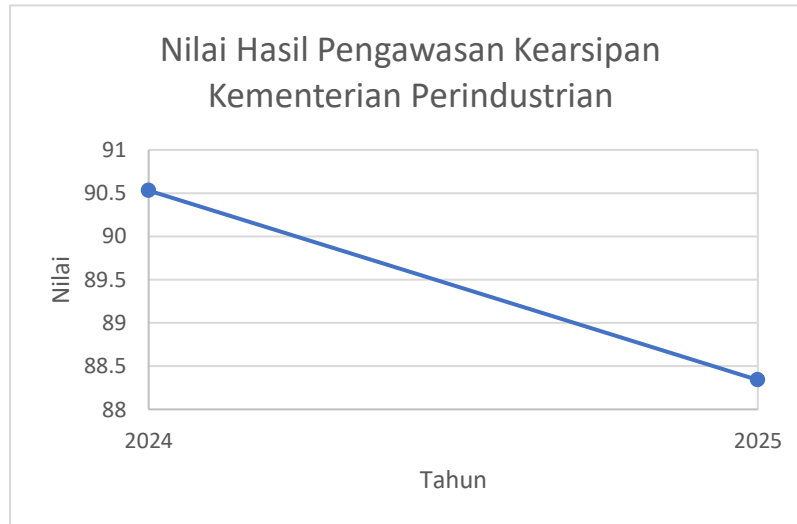
Hasil audit mengonfirmasi kesiapan infrastruktur digital Kementerian Perindustrian yang tercermin pada poin-poin berikut:

- Adopsi Menyeluruh: Aplikasi SRIKANDI telah diterapkan di seluruh unit pengolahan di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- Keamanan Transaksi: Seluruh penandatanganan naskah dinas telah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi yang diterbitkan oleh BSSN.
- Dukungan Teknis Mandiri: Kementerian Perindustrian telah memiliki tim helpdesk khusus berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No. 175 Tahun 2023 untuk menangani permasalahan aplikasi secara internal).

Analisis Kondisi Eksisting: Hasil Pengawasan Kearsipan Kemenperin 2025

SRIKANDI sudah diimplementasikan di seluruh satker Kementerian Perindustrian, namun belum sepenuhnya diikuti oleh kematangan tata kelola arsip digital. Temuan audit memperlihatkan masih adanya kendala pada aspek pengelolaan arsip dinamis, kompetensi SDM kearsipan, dan penyempurnaan kebijakan internal, sehingga menunjukkan bahwa transformasi digital kearsipan tidak hanya memerlukan adopsi teknologi, tetapi juga penguatan organisasi, regulasi, dan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam konteks transformasi digital birokrasi, keberhasilan implementasi sistem informasi kearsipan tidak hanya diukur dari tingkat penggunaan aplikasi, tetapi juga dari kualitas tata kelola arsip yang dihasilkan. Oleh karena itu, hasil pengawasan kearsipan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi digitalisasi arsip di lingkungan Kementerian Perindustrian. Berdasarkan hasil Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) yang dilakukan oleh ANRI, terdapat perubahan capaian nilai pengawasan kearsipan pada periode tahun 2024 hingga tahun 2025. Perubahan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

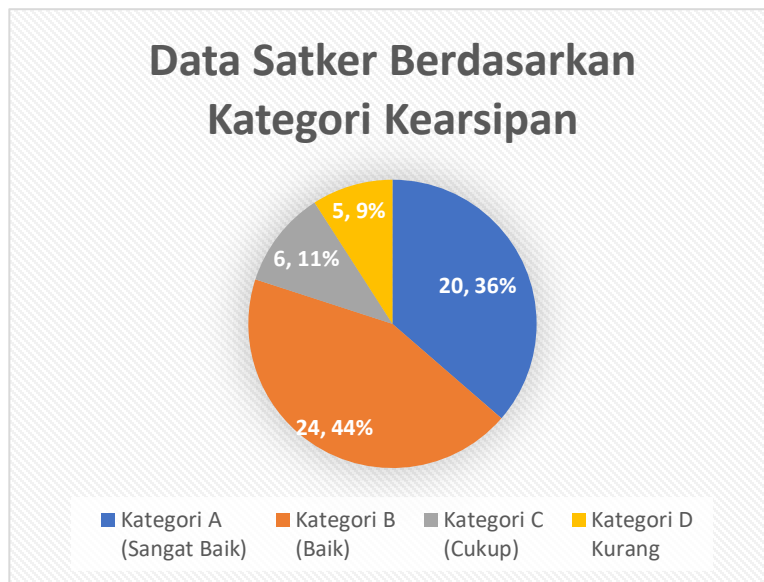


Gambar 1. Grafik Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian Perindustrian

Sumber: LAKE Kemenperin 2024 dan 2025

Pencapaian Nilai Hasil Pengawasan (NHP) 2025: Kementerian Perindustrian memperoleh nilai akumulasi 88,75 dengan kategori "A (Memuaskan)". Nilai ini merupakan gabungan dari bobot pengawasan eksternal (60%) sebesar 88,34 dan pengawasan internal (40%) sebesar 89,39. Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA): Kemenperin mencatatkan skor yang sangat tinggi yakni 93,45 dengan kategori "AA (Sangat Memuaskan)". Skor ini menunjukkan bahwa secara infrastruktur teknologi, SRIKANDI telah diadopsi dengan sangat baik. Analisis Penurunan Kinerja: Terdapat penurunan skor total dari tahun 2024 (90,53) ke tahun 2025 (88,34) sebesar 2,19 poin. Penurunan ini secara signifikan terjadi pada aspek Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber Daya Kearsipan.

Berdasarkan **Berita Acara Nomor: AK.01.00/198/2025**, hasil verifikasi pengawasan kearsipan internal menunjukkan perbedaan kinerja yang tajam di antara 55 unit kerja yang diperiksa.



Gambar 2. Data Satker Berdasarkan Kategori Kearsipan

Sumber: Kemenperin

Berdasarkan data yang kami tampilkan di bawah ini, terdapat kesenjangan dalam implementasi SRIKANDI. Ada unit – unit yang memiliki nilai kearsipan yang tinggi, tetapi ada juga unit - unit dengan nilai kearsipan yang kurang.

Tabel 2. Rekapitulasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perindustrian 2025

Kategori	Nilai	Jumlah Unit	Unit dengan Skor Ekstrem
A (Sangat Baik)	> 90	20 Unit	Direktorat Akses Industri Internasional (96.03), Biro Umum (Unit Pengolah) (95.79)
B (Baik)	80 - 90	24 Unit	Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (90.61), Biro OSDM (80.67)
C (Cukup)	70 - 80	6 Unit	Inspektorat III (77.86), Inspektorat I (72.06)
D (Kurang)	60 - 70	5 Unit	Inspektorat IV (65.36), Pusat Perumusan Standarisasi (65.37), Sekretariat BSKJI (69.90)

Sumber: Kementerian Perindustrian

Analisis Kritis dan Urgensi Perubahan: Meskipun terdapat unit kerja dengan performa luar biasa seperti Direktorat Akses Industri Internasional, keberadaan unit dengan kategori "D" seperti Inspektorat IV dan Pusat Perumusan Standarisasi menunjukkan bahwa sistem belum berjalan secara merata, dan memerlukan pendampingan khusus.

Kesenjangan ini dipengaruhi oleh pemanfaatan Intranet Kemenperin (intranet.kemenperin.go.id) yang dominan. Sebagai aplikasi yang lebih dahulu mapan, Intranet menjadi tantangan dalam proses transisi sistem. Penggunaan intranet mengakibatkan pengulangan pekerjaan yang menghambat efisiensi. Di sisi lain, penggunaan media komunikasi non-resmi untuk administrasi kedinasan memiliki kerentanan dari sisi kepastian hukum dan keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen untuk memusatkan seluruh korespondensi pada sistem resmi demi menjamin legalitas dan kerahasiaan informasi.



Gambar 3. Intranet Kemenperin

Sumber: Kementerian Perindustrian

Analisis Variabel Implementasi (Perspektif Van Meter & Van Horn)

Melalui kacamata Van Meter & Van Horn, ditemukan hambatan sistemis dalam implementasi SRIKANDI di Kemenperin:

1. Standar dan Tujuan: Tujuan kebijakan ditetapkan dengan dengan jelas. Hanya saja tujuan tersebut hanya berhenti sebagai formalitas administratif. Tujuan kebijakan seharusnya berupa transformasi sistem kerja yang menyentuh segala lapisan termasuk di tingkat operator, sayangnya belum terlaksana sepenuhnya. Esensi perubahan budaya kerja digital menjadi belum terinternalisasi sepenuhnya. Kesenjangan antara kebijakan dengan praktik di lapangan disebabkan oleh desain kebijakan belum menyentuh ke pengguna (human centered design). Hal ini menyebabkan inovasi publik seringkali terhambat (Bason, 2010).
2. Sumber Daya: Sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala utama dalam penerapan SRIKANDI. Tidak semua pegawai memiliki literasi digital yang memadai, khususnya di unit kerja daerah. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung seperti jaringan internet stabil, komputer yang kompatibel, dan perangkat digital signature (tanda

- tangan elektronik) belum tersedia secara merata. Dari sisi sumber daya keuangan, anggaran untuk pelatihan, pengadaan infrastruktur, serta dukungan teknis masih terbatas. Hal ini berdampak langsung terhadap kecepatan dan kualitas implementasi aplikasi. Kesenjangan sumber daya ini merupakan tantangan dalam organisasi yang menjalankan sistem secara desentralisasi. Implementasi SRIKANDI secara konsisten sangat bergantung pada kesiapan sumber daya di segala lini (Daft, 2021).
3. Hubungan Antarorganisasi: Implementasi SRIKANDI perlu kolaborasi lintas lembaga antara Kemenperin, ANRI, dan BSSN. Koordinasi antar unit di Kementerian Perindustrian juga perlu diperkuat. Masih terdapat perbedaan dalam implementasi SRIKANDI. Beberapa unit masih menggunakan aplikasi intranet paralel dengan SRIKANDI. Perlu adanya Standard Operating Procedure (SOP) untuk menyeragamkan tata naskah dinas pada Kementerian Perindustrian. Hal ini perlu dilaksanakan agar tidak terjadi double-entry yang menyebabkan inefisiensi pada instansi.
 4. Karakteristik Lembaga: Kementerian Perindustrian merupakan organisasi yang besar dengan lebih dari 50 UPT yang tersebar luas di Seluruh Indonesia. Hal ini bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Organisasi yang besar cenderung memiliki sifat birokrasi yang kaku (Daft, 2021), sehingga menghambat adopsi inovasi seperti SRIKANDI.
 5. Kondisi Sosial-Politik: Birokrasi yang bersifat kaku tentu saja berdampak pada kesiapan lingkungan dalam menerima SRIKANDI sebagai inovasi. Kondisi ini menuntut pemimpin untuk menyiapkan lingkungan menjadi lebih adaptif dengan inovasi.
 6. Disposisi Pelaksana: Fasilitas pendukung implementasi kearsipan digital memerlukan pemeliharaan dan pengawasan secara berkala untuk menjamin keberlangsungan sistem pengamanan arsip. Namun demikian, pada bulan Oktober 2024 ditemukan adanya gangguan pada sistem proteksi kebakaran di record center, berupa korsleting pada fire alarm serta tidak berfungsinya smoke detector. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sarana pengamanan arsip masih memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih optimal guna meminimalkan risiko kerusakan arsip akibat bencana kebakaran.

Selain kendala infrastruktur, implementasi aplikasi SRIKANDI juga menghadapi tantangan pada aspek sumber daya manusia, khususnya terkait kesiapan pegawai dalam beradaptasi terhadap perubahan pola kerja berbasis digital. Transformasi sistem kearsipan melalui aplikasi SRIKANDI menuntut pegawai untuk mempelajari mekanisme kerja baru dan menyesuaikan diri dengan proses administrasi yang terdigitalisasi. Namun, tidak seluruh pegawai menunjukkan tingkat penerimaan yang sama terhadap perubahan tersebut. Sebagian

pegawai masih cenderung menggunakan metode komunikasi dan administrasi sebelumnya, seperti melalui Intranet dan WhatsApp, karena dianggap lebih familiar dan mudah digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

Strategi Percepatan Model 8 Langkah Kotter

Kementerian Perindustrian harus mengambil langkah strategis untuk memastikan SRIKANDI menjadi sistem operasional tunggal:

1. Membangun Urgensi Perubahan: Membangun kesadaran para pegawai untuk bertransisi dari intranet ke SRIKANDI. Mensosialisasikan pelaksanaan SRIKANDI sebagai bentuk kepatuhan terhadap Perpres 95/2018 tentang SPBE. Implementasi SRIKANDI memiliki peran penting yang mempengaruhi Indeks Nilai Reformasi Birokrasi.
2. Membentuk Tim Pengarah Percepatan: Menetapkan peran strategis:
 - Biro Umum: Selaku Policy Owner yang menjamin kualitas sensual Standar Kearsipan Nasional.
 - Pusdatin: Sebagai Technical Lead untuk memastikan kesiapan infrastruktur yang menjamin kestabilan sistem.
 - Biro OSDM: Sebagai Change Management Lead yang Bertanggung jawab penuh dalam mengelola aspek psikologis dan kompetensi sumber daya manusia guna meminimalkan resistensi serta mempercepat adaptasi terhadap sistem baru.
3. Menyusun Visi dan Strategi: Menetapkan target transisi sistem dari intranet ke SRIKANDI dalam 6 bulan ke depan. Target utama adalah pencapaian full-adoption dalam jangka waktu enam bulan melalui strategi migrasi data yang terukur dan sinkronisasi kebijakan di seluruh unit kerja.
4. Mengomunikasikan Visi: Melaksanakan coaching clinic yang berkelanjutan. Dengan adanya coaching clinic, para pegawai yang menjadi operator terutama di satker daerah bisa saling berbagi pengalaman dalam menggunakan SRIKANDI serta dapat menemukan solusinya.
5. Memberdayakan Pegawai: Menyediakan pendampingan teknis (mentoring) khusus bagi unit yang masuk dalam Kategori D (seperti Inspektorat IV).
6. Mencapai Kemenangan Jangka Pendek: Pemilihan Direktorat Akses Industri Internasional sebagai pilot project implementasi aplikasi SRIKANDI didasarkan pada pertimbangan tingkat kompleksitas tata kelola persuratan yang tinggi, khususnya dalam pengelolaan surat dinas internasional yang memerlukan ketepatan administrasi, kecepatan disposisi, keamanan dokumen, serta koordinasi lintas instansi. Karakteristik tersebut menjadikan unit kerja ini strategis untuk dijadikan percontohan dalam penerapan sistem kearsipan digital terintegrasi.

Selain memiliki intensitas korespondensi yang tinggi, Direktorat Akses Industri Internasional juga menunjukkan capaian pengelolaan kearsipan yang sangat baik dengan perolehan skor sebesar 96,03. Capaian tersebut mencerminkan kesiapan organisasi, dukungan pimpinan, serta komitmen unit kerja dalam mendukung implementasi transformasi digital kearsipan melalui aplikasi SRIKANDI. Oleh karena itu, unit kerja tersebut dipandang layak menjadi model implementasi bagi satuan kerja lainnya di lingkungan Kementerian Perindustrian.

7. Mengonsolidasikan Hasil: Memanfaatkan data keberhasilan Pilot Project untuk menekan mengajak unit kerja yang masih mengalami tantangan dalam beradaptasi. Dengan langkah ini, diharapkan unit kerja yang menghadapi tantangan, memiliki motivasi dan referensi untuk mengadopsi SRIKANDI secara penuh.
8. Menginstitusionalisasikan Pendekatan Baru: Wajib melakukan amandemen pada metrik Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan memasukkan tingkat penggunaan SRIKANDI sebagai poin penilaian kinerja individu dan unit kerja.

Identifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Faktor Pendukung

Keberhasilan implementasi aplikasi SRIKANDI tidak terlepas dari adanya berbagai faktor pendukung yang berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan sistem kearsipan digital. Adapun faktor-faktor pendukung dalam implementasi aplikasi SRIKANDI adalah sebagai berikut:

- Regulasi yang bersifat memaksa: Dasar hukum (UU Kearsipan dan Perpres SPBE) menyediakan legitimasi kuat bagi pimpinan untuk memaksakan transisi.
- Infrastruktur Pusat: Dukungan teknis dari ANRI dan Kominfo yang sudah siap secara nasional.
- Komitmen Unit Berkinerja Tinggi: Adanya contoh sukses di internal kementerian yang dapat menjadi rujukan

Faktor Penghambat

Setiap inovasi dalam organisasi umumnya menghadapi tantangan dalam proses implementasinya, termasuk penerapan aplikasi SRIKANDI sebagai sistem kearsipan digital. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan terhadap optimalisasi implementasi aplikasi SRIKANDI, antara lain sebagai berikut:

- Literasi Digital yang Heterogen: Kesenjangan kompetensi teknis yang signifikan antara pegawai di pusat dengan satuan kerja daerah (Balai/UPT).
- Kesenjangan Infrastruktur: Belum meratanya akses terhadap perangkat tanda tangan digital (digital signature) dan kestabilan jaringan di daerah.

- Budaya Organisasi Silo: Karakteristik birokrasi yang hierarkis cenderung menolak keterbukaan sistem yang ditawarkan oleh SRIKANDI.
- Kesenjangan Kebijakan: Kebijakan Klasifikasi Arsip dan JRA saat ini belum mengakomodasi fungsi-fungsi baru seperti Industri Halal, Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), dan Sistem Informasi Industri.
- Kerusakan Infrastruktur Keamanan: Sistem pengamanan kebakaran di record center mengalami masalah serius; smoke detector tidak berfungsi dan fire alarm mengalami konsleting sejak Oktober 2024.
- Kekurangan SDM Bersertifikat: Dari total kebutuhan 518 arsiparis berdasarkan analisis kebutuhan, saat ini baru tersedia 136 orang. Selain itu, Kepala Unit Kearsipan I belum lulus pelatihan teknis khusus Pimpinan Unit Kearsipan

KESIMPULAN

Implementasi aplikasi SRIKANDI di lingkungan Kementerian Perindustrian telah mendukung proses transformasi digital kearsipan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip dinamis. Namun demikian, implementasi tersebut belum berjalan secara optimal dan merata pada seluruh satuan kerja. Perbedaan tingkat capaian antarunit kerja menunjukkan bahwa tantangan utama implementasi tidak lagi terbatas pada aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga berkaitan dengan manajemen perubahan organisasi, kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan digital, serta kesiapan sumber daya manusia dalam beradaptasi dengan sistem kerja baru. Selain itu, keberadaan sistem internal yang masih berjalan secara paralel dengan SRIKANDI menunjukkan bahwa integrasi sistem kearsipan digital di lingkungan Kementerian Perindustrian belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, komitmen organisasi, dan strategi implementasi yang lebih terintegrasi untuk mendukung optimalisasi penerapan SRIKANDI.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung optimalisasi implementasi aplikasi SRIKANDI di lingkungan Kementerian Perindustrian, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Komitmen Pimpinan melalui Pendekatan Top-Down

Kementerian Perindustrian perlu menerapkan kebijakan yang lebih tegas melalui instruksi langsung dari pimpinan tertinggi kementerian terkait kewajiban penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam seluruh proses korespondensi kedinasan. Pendekatan ini diperlukan untuk mengurangi resistensi organisasi dan memperkuat kepatuhan terhadap implementasi sistem kearsipan digital.

2. Integrasi Penggunaan SRIKANDI ke dalam Penilaian Kinerja Pegawai

Tingkat penggunaan aplikasi SRIKANDI perlu diintegrasikan ke dalam indikator Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan evaluasi tunjangan kinerja. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin penggunaan sistem sekaligus mendorong budaya kerja digital di lingkungan kementerian.

3. Penerapan SRIKANDI sebagai Sistem Kearsipan Utama

Kementerian Perindustrian perlu melakukan transisi secara bertahap dari penggunaan sistem internal yang sejenis menuju penggunaan SRIKANDI sebagai sistem kearsipan digital utama sesuai kebijakan SPBE nasional. Langkah ini penting untuk mendukung integrasi data dan standardisasi pengelolaan arsip secara nasional.

4. Peningkatan Kompetensi SDM Kearsipan

Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis, dan sertifikasi kearsipan bagi arsiparis maupun pengelola arsip di lingkungan kementerian. Selain itu, pimpinan unit kerja kearsipan juga perlu mengikuti pelatihan teknis guna memperkuat kapasitas manajerial dalam implementasi transformasi digital kearsipan.

REFERENSI

- Aini. (2023). Analisis Implementasi Aplikasi SRIKANDI dalam Mendukung Pengelolaan Arsip Digital pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- Altino, dkk. (2025). Measuring Factors of Trust in the Use of E-Government: A Multi-Factor Analysis of the E-Government in Indonesia
- Ansell, C., & Gash, A. (2014). Collaborative Governance in Theory and Practice. Oxford University Press.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2025). Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) Tahun 2025: Kementerian Perindustrian.
- Bason, C. (2010). Leading Public Sector Innovation: Co-creating for a Better Society. Policy Press.
- Daft, R. L. (2021). Organization Theory & Design (13th ed.). Cengage Learning.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hadi. P. (2022). Transformasi Digital dan Inovasi Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat.
- Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.
- Kotter, J. P. (2024). The 8-Step Process for Leading Change. Harvard Business Review Press.

Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen (Baashima)

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi

e-ISSN: 2988-1056

Volume: 4 Nomor: 1 (April: 2026) pp: 48-65

DOI: <https://doi.org/10.61492/baashima.v4i1.530>

- Kurniadi, Ibrahim, & Badruzzaman. (2025). Evaluation of the efficiency of electronic filing systems in handling records: a case study of SRIKANDI applications in government institutions.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan ANRI.
- Read, J., & Glinn, K. (2010). Records Management. Cengage Learning.
- Suprayitno, Rahmi, & Sofiyani. (2024). Toward Transparent Bureaucracy: NLP-Based Document Classification and Power Dynamics in the SRIKANDI System
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society. Sage Publications.
- Winarni. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Pendekatan Deskriptif dalam Ilmu Administrasi